UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Divisi Hukum dan Investigasi. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2025.

HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi-Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Prayoga, Ilham, dan Kasmanto Rinaldi, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Secara Kekeluargaan*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2023.

Rafi' Abu Fida' Abdur. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika, 2006.,

Sambas, Nandang, dan Dian Andriasari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sumarsono, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2004

Syarif, Laode M. dan Dadang Trisasongko. *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*. Jakarta Selatan: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

B. Artikel Jurnal

Muminah, S., dan Suprajogo, T., "Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up". (Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business) 8, no. 4 (Oktober, 2025): hlm. 1485–1495.

Marsinah, Rahma, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia". (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma) 6, no.2 (Maret 2016): 86–96

Winadi, Enrico, Benedictus Renny, Antonius Maria, "Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Yogyakarta", (Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora) 3, no. 3 (Oktober, 2024): hlm. 108–130

C. Hasil Penelitian

Arha, Denasthi "Kebijakan Pembangunan Desa Berperspektif Pro-Poor: Studi Tata Kelola Tanah Kas Kalurahan Di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman", Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2025.

Ningsih, Junita. "Pengaturan Sanksi Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Kayona, Eduardo. "Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa: Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

Rufaida, Hilda, "Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pasca Penghapusan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

D. Artikel Internet

Biro Hubungan Masyarakat. "Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi". (KPK), 11 Februari, 2025, https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi.

Informasi Kejaksaan Agung. "Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)", https://share.google/1ug0zmIFRN2WRudHD, (diakses pada 29, November 2025).

Jawa Post, "Berita Seputar Penyalahgunaan TKD Terbaru dan Terkini Hari Ini", Jawapost, Sabtu, 13 Desember, 2025, https://radarjogja.jawapos.com/tag/penyalahgunaan-tkd.

Jumadi, Sherly Putri."Eks Dukuh Candirejo Jadi Tersangka Korupsi TKD Rugikan Negara RP 733 Juta", detikjogja, 12 September, 2025, https://www.detik.com/jogja/berita/d-8108549/eks-dukuh-candirejo-jadi-tersangka-korupsi-tkd-rugikan-negara-rp-733-juta.

Kejaksaan Tinggi DIY. "JAM-Intelijen Sosialisasikan Peran Kejaksaan Agung dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa", Kejati DIY, 1 Januari, 2025, https://kejati-diy.kejaksaan.info/conference/news/3280/read.

Kejaksaan Tinggi DIY, "Jamintel Sosialisasi Jaga Desa dan Pengukuhan DPC ABPEDNAS di Kabupaten Bogor", 27 November, 2025, https://kejati-diy.kejaksaan.info/conference/news/9522/read.

Rizki, Muhammad Januar. "Memperkuat Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan. (Hukumonline), 16 Mei 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/memperkuat-pencegahan-korupsi-perizinan-sektor-pertanahan-lt646450cdcb583/?page=1.

Subarkah, Lugas. "Lurah Non Aktif Candibinangun Sismantoro Divonis 4 Tahun Denda Rp200 Juta Terkait Penyelewengan Tanah Kas Desa". (harian jogja), 31 Oktober, 2024, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/10/31/510/1193442/lurah-non-aktif-candibinangun-sismantoro-divonis-4-tahun-denda-rp200-juta-terkait-penyelewengan-tanah-kas-desa.

Subarkah, Lugas, "Pergub Baru Pemanfaatan Tanah Kalurahan Diketok, Masa Sewa Jadi 5 Tahun", (harian jogja), 28 Mei, 2024, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/28/510/1176056/pergub-baru-pemanfaatan-tanah-kalurahan-diketok-masa-sewa-jadi-5-tahun.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Waluyo, Kukuh Galang. "Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya". (KPPN Manokwari), 8 Maret, 2022, https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.

Yefrizal, "Implementasi INSJA Nomor 5 Tahun 2023, Puspenkum Kejagung Sosialisasi Program Jaga Desa di Sumut", (Kejaksaannews) 3 Agustus, 2023, https://kejaksaan.sigapnews.co.id/news/sn-56781/implementasi-insja-nomor-5-tahun-2023-puspenkum-kejagung-sosialisasi-program-jaga-desa-di-sumut

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *(Wetboek van Strafrecht)*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-046/A/Ja/12/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Program Jaksa Gada Desa.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2025 tentang Daftar Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Dan Tipe Kejaksaan Negeri Di Seluruh Indonesia.

Peraturan Kalurahan Sumberadi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Peraturan Kalurahan Tamanmartani Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Tamanmartani.

Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Parangtritis.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

F. Putusan Pengadilan

Putusan PN Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk perihal putusan tingkat pertama perkara Robinson Saalino, 19 Oktober 2023.

Putusan PN Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, perihal putusan tingkat pertama Krido Suprayitno, 6 Maret 2024

Putusan PN Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk perihal putusan tingkat pertama Kasidi S.E, 10 Juni 2024.

Putusan PN Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk perihal putusan tingkat pertama perkara Suharman Bin Harjo Sumarto, selasa 27 Mei 2025

Putusan PN Yogyakarta Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk perihal putusan tingkat pertama perkara Turisti Hindriya Bin Samsu, 30 Juli 2025.

Putusan PN Yogyakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk perihal putusan tingkat pertama perkara Sarjono, 3 Februari 2026.

Putusan PT Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT Yyk Perihal putusan banding perkara Robinson Saalino, 30 November 2023

Putusan PT Yogyakarta Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2024/PT YYK perihal putusan banding Kasidi S.E, 23 Juli 2024.

Putusan PT Yogyakarta Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PT YYK perihal putusan tingkat banding perkara Suharman Bin Harjo Sumarto, 17 Juli 2025.

Putusan PT Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2025/PT YYK perihal putusan tingkat banding perkara Turisti Hindriya Bin Samsu, 19 Agustus 2025.

Putusan PT Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sud-TPK/2026/PT YYK perihal putusan banding perkara Sarjono, 12 Maret 2026.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3931 K/Pid.Sus/2025 perihal putusan kasasi Kasidi S.E, 14 Mei 2025.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Pid.Sus/2026 perihal putusan kasasi perkara Turisti Hindriya Bin Samsu, 21 Oktober 2025.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 10582 K/Pid.Sus/2025 perihal putusan tingkat kasasi perkara Suharman Bin Harjo Sumarto, 27 November 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Kebijakan Program Jaksa Garda Desa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan
Muhammad Annas Nabil Fauzan, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 112